

Lampiran Berita Acara
Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD
Tahun 2027
Perangkat Daerah :
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KETENTUAN UMUM				
1.	Renja Perangkat Daerah mempedomani sistematika pada Permendagri No 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		
KETENTUAN BAB PER BAB				
BAB I PENDAHULUAN				
1.	Pada Bab I Pendahuluan sekurang-kurangnya terdiri dari sub bab, yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.	√		
2.	Pada Landasan Hukum telah memuat :			
	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105).	√		
	Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah	√		
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395).	√		
	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346).	√		
	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	√		

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	√		
	...Dasar hukum lain yang relevan	√		
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
3.	Penyajian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (n-1) dalam bentuk narasi dan Tabel T-C.29. Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	√		
4.	Penyajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dalam bentuk narasi dan tabel T-C.30. Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	√		
5.	Menyajikan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
6.	Menyajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027 dalam bentuk narasi dan tabel T-C.31. Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	√		
7.	Menyajikan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 dalam bentuk narasi dan tabel T-C.32. Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	√		
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
8.	Menyajikan telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas nasional serta tujuan dan sasaran renja PD yang didasarkan rumusan isu penting penyelenggaraan tasi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.	√		
9.	Menarasikan program dan kegiatan seperti faktor yang menjadi bahan pertimbangan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan ranwal RKPD dan menyajikan Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028. Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	√		
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
10.	Menampilkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	√		

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	PD telah merinci Komponen Belanja Tahun 2027	√		
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:				
1.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.	√		
2.	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.	√		
BAB VI PENUTUP				
13.	Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	√		
KETENTUAN LAINNYA				
14.	Rankhir Renja PD telah memuat Sub Kegiatan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX
15.	Rankhir Renja PD telah memuat sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0008)	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX
16.	Rankhir Renja PD telah memuat sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0010)	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX
17.	Rankhir Renja PD telah menganggarkan Penyusunan Perubahan Renstra PD pada tahun 2027 melalui sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001)	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX
18.	Rankhir Renja PD telah menganggarkan sub Kegiatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX
19.	Rankhir Renja PD telah menganggarkan sub Kegiatan tentang Bela Negara	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX
21.	Rankhir Renja PD telah menganggarkan sub Kegiatan tentang Ekonomi Syariah	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX
22.	Rankhir Renja PD telah menganggarkan sub Kegiatan tentang(tematik tertentu yang dikawal bidang)	√		Telah dianggarkan sejumlah Rp. XXX

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi																																																																																																																
		Sesuai	Tidak Sesuai																																																																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																																																																																																
23.	OPD yang terindikasi memiliki hibah bansos, telah melaksanakan ketentuan berdasarkan Pergub Nomor 25 Tahun 2021 (sebelum Musrenbang)	√																																																																																																																		
24.	Proporsi Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rutin) terhadap total Pagu			Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Total Pagu OPD x 100% = ...%																																																																																																																
25.	OPD telah menganggarkan sub kegiatan yang terindikasi mendukung PROSN	√																																																																																																																		
26.	Nominal Pagu Belanja Rutin			Sejumlah Rp. xxx																																																																																																																
27.	Nominal Pagu Belanja PPPK Paruh Waktu			Sejumlah Rp. Xxx																																																																																																																
28.	Nominal Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan beserta penamaan sumber pendanaannya pada SIPD-RI	√		<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Perangkat Daerah</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pajak Kendaraan Bermotor</td><td>92.142.584.030,46</td><td>PUBMTR</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak Rokok</td><td>105.090.789.976,05</td><td>Dinas Kesehatan</td></tr><tr><td>3.</td><td>DBH Cukai Hasil Tembakau</td><td>179.341.000,00</td><td>Dinas Perkebunan</td></tr><tr><td>4.</td><td>DBH SDA Dana Reboisasi</td><td>110.994.000,00</td><td>Dinas Kehutanan</td></tr><tr><td>5.</td><td>DBH Sawit</td><td>12.232.699.000,00</td><td>PUBMTR</td></tr><tr><td>6.</td><td>DAU ditentukan penggunaannya</td><td>52.451.468.000,00</td><td>Dinas Pendidikan</td></tr><tr><td>7.</td><td>DAK Fisik</td><td>12.364.440.000,00</td><td>Dinas Kesehatan</td></tr><tr><td>8.</td><td>DAK Non Fisik diluar Tunjangan Guru</td><td>567.040.929.000,00</td><td>Dinas Pendidikan</td></tr><tr><td>9.</td><td>Pendapatan Hibah</td><td>4.109.705.000,00</td><td>Dinas Kebudayaan</td></tr><tr><td>10.</td><td>Pendapatan BLUD</td><td>274.441.011.366,85</td><td>Dinas Pariwisata</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Dinas Kesehatan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Dinas UKM</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DPKPA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Dispusatka</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bapenda</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>RS. Gigi & Mulut</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>RS. Mata</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>RSUD Siti Fatimah</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Dinas Kesehatan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DLHP</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>BPSDMD</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Dinas Perhubungan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Dinas ESDM</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Dinas PUBMTR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Disperkim</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DKPP</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1.120.163.961.373,36</td><td></td></tr></table>	No	Uraian	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah	1.	Pajak Kendaraan Bermotor	92.142.584.030,46	PUBMTR	2.	Pajak Rokok	105.090.789.976,05	Dinas Kesehatan	3.	DBH Cukai Hasil Tembakau	179.341.000,00	Dinas Perkebunan	4.	DBH SDA Dana Reboisasi	110.994.000,00	Dinas Kehutanan	5.	DBH Sawit	12.232.699.000,00	PUBMTR	6.	DAU ditentukan penggunaannya	52.451.468.000,00	Dinas Pendidikan	7.	DAK Fisik	12.364.440.000,00	Dinas Kesehatan	8.	DAK Non Fisik diluar Tunjangan Guru	567.040.929.000,00	Dinas Pendidikan	9.	Pendapatan Hibah	4.109.705.000,00	Dinas Kebudayaan	10.	Pendapatan BLUD	274.441.011.366,85	Dinas Pariwisata				Dinas Kesehatan				Dinas UKM				DPKPA				Dispusatka				Bapenda				RS. Gigi & Mulut				RS. Mata				RSUD Siti Fatimah				Dinas Kesehatan				DLHP				BPSDMD				Dinas Perhubungan				Dinas ESDM				Dinas PUBMTR				Disperkim				DKPP	Total		1.120.163.961.373,36	
No	Uraian	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah																																																																																																																	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	92.142.584.030,46	PUBMTR																																																																																																																	
2.	Pajak Rokok	105.090.789.976,05	Dinas Kesehatan																																																																																																																	
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau	179.341.000,00	Dinas Perkebunan																																																																																																																	
4.	DBH SDA Dana Reboisasi	110.994.000,00	Dinas Kehutanan																																																																																																																	
5.	DBH Sawit	12.232.699.000,00	PUBMTR																																																																																																																	
6.	DAU ditentukan penggunaannya	52.451.468.000,00	Dinas Pendidikan																																																																																																																	
7.	DAK Fisik	12.364.440.000,00	Dinas Kesehatan																																																																																																																	
8.	DAK Non Fisik diluar Tunjangan Guru	567.040.929.000,00	Dinas Pendidikan																																																																																																																	
9.	Pendapatan Hibah	4.109.705.000,00	Dinas Kebudayaan																																																																																																																	
10.	Pendapatan BLUD	274.441.011.366,85	Dinas Pariwisata																																																																																																																	
			Dinas Kesehatan																																																																																																																	
			Dinas UKM																																																																																																																	
			DPKPA																																																																																																																	
			Dispusatka																																																																																																																	
			Bapenda																																																																																																																	
			RS. Gigi & Mulut																																																																																																																	
			RS. Mata																																																																																																																	
			RSUD Siti Fatimah																																																																																																																	
			Dinas Kesehatan																																																																																																																	
			DLHP																																																																																																																	
			BPSDMD																																																																																																																	
			Dinas Perhubungan																																																																																																																	
			Dinas ESDM																																																																																																																	
			Dinas PUBMTR																																																																																																																	
			Disperkim																																																																																																																	
			DKPP																																																																																																																	
Total		1.120.163.961.373,36																																																																																																																		